KEBERLANGSUNGAN REZIM PERDAGANGAN BEBAS *WORLD TRADE ORGANIZATIONS* (WTO) DENGAN ADANYA KEBIJAKAN PROTEKSI PERTANIAN AMERIKA SERIKAT

Mohammad Ridwan

Ilmu Hubungan Internasional ,Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur No.112-114,Bandung,40132,Indonesia

E-Mail : *mohammadridwan06@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh keberlangsungan Rezim Perdagangan bebas *Bebas World Trade Organizations* (WTO) dengan adanya Kebijakan proteksi pertanian Amerika Serikat. Masalah dalam penelitian ini adalah terjadinya proses negosiasi panjang dalam rezim perdagangan Bebas *World Trade Organizations* (WTO) dibawah putaran perundingan *Doha Development Agenda* (DDA) terutama masalah liberalisasi pertanian. Salah satu yang menjadi permasalahan dalam perundingan ini adalah kebijakan proteksi pertanian Amerika Serikat. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana keberlangsungan Rezim perdagangan bebas WTO melalui perundingan-perundingannya sampai perundingan terakhir di Nairobi.

Metode dalam penelitian menggunakan metode kualitatif. Sebagian besar data dikumpulkan dari hasil wawancara dan literatur serta didukung oleh studi pustaka dan penelusuran *website*.

Hasil dari penelitian ini adalah Keberlangsungan Rezim perdagangan bebas WTO dengan Adanya kebijakan proteksi pertanian Amerika Serikat adalah *Status Quo*. Dalam hal ini ada prinsip yang disepakati dalam perundingan dibawah DDA yaitu Prinsip *Single Undertaking* yaitu prinsip bahwa semua masalah atau isu dalam perundingan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan oleh karena itu "tidak akan ada kesepakatan sampai semua masalah atau isu di sepakati" Hal ini dapat dilihat belum disepakatinya 2 pilar dalam isu pertanian yaitu subsidi domestik dan akses pasar. Namun jika dilihat pada perundingan terakhir di Nairobi Kenya, diputuskan penghapusan subsidi ekspor bagi negara maju tahun 2016, sementara bagi negara berkembang tahun 2018. Dengan keputusan terahir ini dapat menjadi menjadi titik awal bagi proses liberalisasi dalam bidang pertanian.

Kata Kunci : Rezim Perdagangan Bebas Pertanian,WTO, Kebijakan Proteksi, Amerika Serikat, *Status Quo*.

ABSTRACT

This research aims to determine the further sustainability of world trade organizations free trade regime with the existence of agricultural protection policy United States of America.This research is problem a long negotiation process occurrence in free trade regime of the World Trade Organizations (WTO) under which is rounds of Doha Development Agenda's is negotiations (DDA) it is especially a problem of agricultural liberalization. One of the problems in this negotiation is agricultural protection policy of the United States. In this research the researchers wanted to know how about the sustainability of WTO free trade regime through the negotiations until the final negotiations in Nairobi.

Methods in research are using qualitative methods. A several of the data is collected from interviews and literature and his supported by literature and website searching.

The results of this research are Sustainability WTO free trade regime with the existence of US agricultural protectionist policies are the Status Quo. In this case there is a principle it was agreed in negotiation beneath the DDA, in other words Single Undertaking Principle which is the principle that all problems or issues in the negotiation is a unity that can not be separated, and therefore "there will be no agreement until all problems or issues are agreed upon" This can be seen before agreement on the two pillars of the agricultural issues which is domestic subsidies and market acsess. But, when seen in the final negotiations in Nairobi Kenya, it was decided the elimination of export subsidies for developed countries in 2016, mean while for developing countries in 2018. By final decision may be a starting point for the process of liberalization in agriculture sector.

Keywords: Agricultural Free Trade Regime, WTO, Protection Policy, United States of America, Status Quo.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kajian Hubungan Internasional globalisasi menjadi salah satu fenomena yang tidak terelakan. Dimana globalisasi identik dengan teknologi misalkan kemajuan teknologi komunikasi dan komputer yang memungkinkan mengalirnya gagasan-gagasan dan informasi yang melintas batas negara. Selain itu fenomena globalisasi juga meliputi meningkatnya hubungan ekonomi, sosial budaya yang melewati batas-batas internasional (Ball et.al, 2014:13-14). Jika kita melihat pada aspek hubungan ekonomi, globalisasi berkaitan dengan masalah perdagangan ataupun investasi.

Dengan munculnya fenomena globalisasi tentu akan meningkatkan sebuah manfaat bagi kemajuan perekonomian dunia. Misalkan saja dengan adanya fenomena globalisasi terutama perdagangan bebas hal ini akan menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik. Horst Kohler dan James Wolfensohn mengungkap, dengan memperluas perdagangan secara kolektif dapat mengurangi hambatan-hambatan yang ada dan ini adalah alat yang paling kuat dimana negara-negara yang bekerjasama, dapat bersama-sama mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup (Ball et.al, 2014:22).

Dalam konteks ini globalisasi diartikan sebagai saling terkait antara dua perekonomian nasional. Dimana perekonomian tidak lagi berdasarkan pada perekonomian nasional yang otonom tetapi berdasarkan pada pasar global. Pada posisi ini perekonomian global yang tunggal mendominasi sejumlah besar perekonomian nasional (Jackson & Sorensen, 2007:228). Salah satu hal terpenting yang menjadi faktor munculnya globalisasi adalah berkaitan dengan liberalisasi perdagangan dan keuangan.

Pada tahun 1947 para ekonom dan tokoh berpengaruh Amerika Serikat dan Inggris berkumpul di New Hampshire AS, untuk membentuk sebuah lembaga yaitu sistem keuangan internasional. Dibentuknya lembaga tersebut tiada lain adalah sebagai respon terhadap kekacauan perekonomian pasca Perang Dunia Ke dua, yang menginginkan suatu tatanan ekonomi global yang stabil, sistem ini dinamakan *Bretton Words System* (Bakry, 2015:98).

Brown dan Ainley mengungkapkan meskipun sistem *Bretton Words* telah berakhir institusi-institusi bentukannya tetap eksis. Adapun menurutnya lembaga–lembaga warisan dari institusi *Bretton Words* adalah WTO *(World Trade Organization),* IMF *Internasional Moneter Found* dan *World Bank*. Menurutnya tebentuknya ITO *(International Trade Organization)* adalah cikal bakal GATT *(General Agreement on Tariff and Trade)* / WTO *(World Trade Organization),* yaitu sebagai depolitisasi ekonomi internasional untuk memisahkan penanganan atas berbagai isu ekonomi ke dalam institusi yang berbeda, yaitu menangani perdagangan dunia. (Winarno, 2011:272).

Sebagai salah satu produk dari *Bretton Words System*, WTO pada saat ini begitu penting terutama pasca dibentuknya lembaga ini volume ekspor perdagangan dunia mengalami peningkatan rata – rata 6% pertahun (Winarno, 2011:39) .

Kesepakatan GATT merupakan kesepakatan yang mengatur berkaitan dengan penciptaan perdagangan yang bebas dan adil dengan memfokuskan pada hambatan tarif dalam perdagangan. Pada tahun 1994 dibentuklah organisasi WTO melalui perundingan Uruguay di *Marrakech* (Marocco). Sebagai satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh negara anggota serta diratifikasi melalui parlemen. Sementara keputusan di WTO dilakukan berdasarkan konsensus (http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasa mamult ilateral/Pages/World-Trade -Organization-%28 WTO

%29.aspx pada tanggal 17/05/ 2016).

Dalam perjalanannya organisasi ini melakukan berbagai perundinganperdagangan untuk dinegosiasikan melalui putaran perundingan, diantaranya perundingan Sing apura tahun 1996, perundingan Jenewa tahun 1998 dan perundingan Seatlle tahun 1999 (http://www.kemendag.go.id/id/faq pada tanggal 17/05/2016).

Pada tahun 2001 perundingan kembali dilakukan di Doha, Qatar dalam perundingan ini dibahas agenda mengenai, liberalisasi produk dan perdagangan di bidang pertanian. Salah satu keberhasilan besar negara-negara berkembang dan negara eksportir produk pertanian dalam perundingan ini adalah dimuatnya mandat mengenai "pengurangan, dengan kemungkinan penghapusan, sebagai bentuk subsidi ekspor". Selain itu juga pada perundingan ini diluncurkan *Doha Development Agenda* sebagai bagian dalam proses perundingan WTO (http:// www.keme ndag.go.id/id/faq pada tanggal 24 /04/ 2016).

Tahun 2003 perundingan kembali dilakukan di Cancun Mexico, sebagai perundingan untuk dinegosiasikan berkaitan dengan mandat Doha, yang di harapkan pada tahun 2004 atau awal tahun 2005 liberalisasi perdagangan mulai di laksanakan. Pada pertemuan ini diwarnai oleh perbedaan kepentingan antara Negara maju dan Negara berkembang. Masalah utama yang menjadi penyebab kegagalan tersebut adalah isu Pertanian sebab masalah pertanian mempunyai implikasi yang sangat sarat dengan kepentingan sosial dan politik. Dalam pertemuan ini tidak dapat menghasilkan suatu keputusan yang konkrit (http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_ kpi/index.php?module=news_detail&news_content_i d=422&detail=true pada tanggal 18/05/2016).

Pada perundingan ini, isu pertanian diwarnai dengan munculnya *joint paper* AS-UE, proposal Group 20 (yang menentang proposal gabungan AS-UE) dan proposal Group 33 (yang memperjuangkan konsep *special product* dan *special safeguard mechanism*). Secara singkat, *joint paper* AS-UE antara lain memuat proposal yang menghendaki adanya penurunan tarif yang cukup signifikan di Negara berkembang, tetapi tidak menginginkan adanya pengurangan subsidi dan tidak secara tegas memuat komitmen untuk menurunkan tarif tinggi di Negara maju. Sebaliknya, Negara berkembang yang tergabung dalam Group 20 menginginkan adanya penurunan subsidi domestik *(domestik support)* dan pengh- apusan subsidi ekspor pertanian di negara-negara maju, sebagaimana dimandatkan dalam Deklarasi Doha (http://www .kemen dag.go.id/id/faq pada tanggal 17/05/2016).

Pada perundingan ini terjadi kebuntuan negosiasi dimana negara maju menginginkan pembicaraan isu baru terutama berkaitan dengan liberalisasi, yang tentu negara maju dapat memanfaatkan ini, namun disisi lain negara berkembang dan LDCs menginginkan penyelesaian masalah pertanian terutama dampak dari subsidi ekspor Amerika Serikat dan keterbukaan akses pasar ke negara tersebut. Dimana Amerika Serikat sangat mendorong berkaitan dengan hal ini. Dan hal ini lah yang menjadi kebuntuan dalam perundingan di Cancun (http://www. globalissues.org/article/438/wto-meeting-in-cancun-mexico-2003 diakses pada tan ggal 03/-8/2016).

Tahun 2005 pertemuan tingkat menteri dilakukan di Hongkong. Dalam pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Menteri mencakup tiga pilar di bidang pertanian. Pada pilar bantuan domestik disepakati jumlah range angka bagi pemotongan bantuan keseluruhan dan bantuan yang mendistorsi perdagangan (AMS). Negara berkembang tanpa komitmen AMS tidak harus mendapatkan pemotongan tarif dan bantuan keseluruhan. Pada pilar kompetisi ekspor disepakati batas waktu penghapusan seluruh bentuk bantuan ekspor (*export subsidies)* (http://www.antaranews .com/print/111479/perjalanan-panjang-terbentuknya-sistem-perdagangan-internasi

onal).

Pertemuan WTO tingkat menteri kembali dilakukan di Bali, Indonesia. Pada pertemuan resmi tingkat menteri ini, terjadi sebuah kesepakatan yang berkaitan dengan paket pertanian, salah satunya dimana proteksi negara berkembang diberikan oleh negara maju. Negara maju juga berkomitmen untuk mengurangi subsidi pertaniannya (http://economy. okezone. com/read/2013/12 /10/ 320/910062/mendag-banggakan-3-paket-hasil-wto-di-bali pada tanggal 18/05/2016). Dalam pertemuan pasca Cancun dilakukan juga pertemuan- pertemuan mini menteri maupun pertemuan resmi.

Martin Khor mengungkap proteksi dan subsidi tetap saja diberlakukan dengan sangat tinggi oleh Amerika Serikat terutama dalam bidang pertanian. Dimana kesepakatan yang diatur oleh WTO mengarahkan pada kesepakatan liberalisme impor. Yaitu pengurangan bantuan domestik serta subsidi ekspor bagi produk - produk pertanian khusunya negara-negara kaya (Asrudin, 2009:95).

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling gencar menyerukan perlunya kedisiplinan negara-negara anggota WTO dalam merealisasi komitmen mereka dalam persetujuan bidang pertanian. Namun demikian, pada saat yang sama Amerika Serikat juga meningkatkan subsidi domestiknya terhadap sektor pertaniannya sehingga banyak negara terutama negara-negara berkembang memprotes Amerika Serikat .

Hal tersebut dapat dilihat dorongan Amerika Serikat terhadap WTO berkaitan dengan reformasi perdagangan. Diantaranya subsidi ekspor, Amerika Serikat menginginkan subsidi ekspor dan kredit ekspor dihapuskan agar mendorong kompetisi ekspor yang *fair*. Selain itu, mengenai *State Trading Enterprise* (STE), Amerika Serikat mengusulkan untuk menghapuskan peranan badan usaha milik negara yang mempunyai hak monopoli dalam melakukan ekspor dan impor produk-produk pertanian. Lebih lanjut, Amerika Serikat menuntut agar STE menotifikasi harga produk dan berbagai informasi mengenai penjualan produk tersebut kepada WTO, serta meminta agar jaminan asuransi oleh pemerintah dihapuskan (http://www.fas.usda.gov/itp/wto/proposal.htm pada tanggal 18/05/2016).

Kebijakan pemberian subsidi Amerika Serikat dibawah pemerintahan George W Bush dalam sektor pertaniannya cukup besar, hal ini dapat dilihat pada *Farm Security and Rural Investment Act of* 2002 (FSRIA) yaitu program untuk pertanian Federal periode 2002-2007, ditandatangani menjadi undang-undang pada 13 Mei 2002. Dan dilanjutkan pada program *The Food, conservasion*, dan *Energi Act of* 2008 dan disahkan menjadi undang-undang oleh Kongres Amerika Serikat pada 18 Juni 2008. Dapat dilihat peran pemerintah Amerika Serikat dalam sektor ini cukup besar diantaranya, pemerintah Amerika Serikat mengawasi dan memiliki otoritas penuh dalam ekspor komoditas pertanian ke luar negeri, selain itu pemerinta Amerika Serikat memberikan program bantuan pinjaman dan pembayaran serta mengatur investasi pertanian. Dalam hal ini pemerintah juga memberikan program jaminan kredit eksport, jaminan kesehatan dan program subsidi langsung komoditas pertanian dan program konservasi (http://www. ers.usda. gov/publications/ap-administrative-publication/ap-022.aspx diakses pada tanggal 07/06/2016).

Subsidi yang diberikan yang terdiri dari gandum, beras, susu, gula, jagung, madu, kedelai, kacang-kacangan, sayuran dan lainnya, sebesar US$177,589, 342,975 (Daniah, 2008:186).

1.2 Rumusan Masalah

1.2.2 Rumusan Masalah Mayor

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah major sebagai berikut **“Bagaimana Keberlangsungan**

Rezim Perdagangan Bebas *World Trade Organizations* (WTO) Dengan Adanya Kebijakan Proteksi Pertanian Amerika Serikat"

1.2.3 Rumusan Masalah Minor

Rumusan Masalah Mayor kemudian diturunkan pada Rumusan masalah minor. Dalam hal ini peneliti merumuskan masalah minor sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan rezim perdagangan bebas WTO sebelum pertemuan Cancun?
2. Bagaimana perkembangan perundingan WTO pasca pertemuan Cancun?
3. Bagaimana kebijakan proteksi pertanian Amerika Serikat Pasca Pertemuan Cancun?
4. Sejauhmana keberlangsungan rezim perdagangan bebas WTO dengan dilakukannya putaran perundingan pasca Cancun ?

1.2.4 Pembatasan Masalah

Dalam memfokuskan lingkup kajian penelitian maka peneliti membatasi masalah berkaitan dengan keberlangsungan perdagangan bebas WTO rentan waktu 2001-2015. Sementara berkaitan dengan kebijakan pertanian Amerika Serikat yang dilakukan pasca putaran Cancun, yang membahas pengurangan tarif di bidang pertanian dalam perundingan WTO terutama pada masa pemerintahan Presiden George W Bush. alasan peneliti memilih rentan waktu tersebut terjadinya kebijakan pertanian proteksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat berupa subsidi dan terjadinya proses perundingan-perundingan berkaitan dengan negosiasi pertanian dalam institusi WTO dimulai parundingan Doha tahun 2001, perundingan Cancun tahun 2003 dan perundingan Jenewa tahun 2008 perundingan Bali 2013 serta perundingan Nairobi Kenya 2015.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah terjadi permasalah yang menurut peneliti harus dicari jawaban terutama berkaitan bagaimana menyikapi masalah yang terjadi, dan bagaimana sikap yang harus diambil dalam era perdagangan bebas. Maka menjadi maksud peneliti untuk mengetahui lebih jauh bagaimana keberlangsungan perdagangan bebas WTO dengan adanya kebijakan proteksi pertanian Amerika Serikat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana perkembangan rezim perdagangan bebas WTO sebelum pertemuan Cancun?
2. Untuk menjelaskan bagaimana perkembangan perundingan WTO pasca pertemuan Cancun?
3. Untuk menjelaskan bagaimana kebijakan proteksi pertanian Amerika Serikat Pasca Pertemuan Cancun?
4. Untuk menjelaskan sejauhmana keberlangsungan rezim perdagangan Bebas WTO dengan dilakukannya putaran perundingan pasca Cancun?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat mengembangkan konsep dan teori yang telah di dapat dan diterapkan dalam penelitian ilmiah. Berupa ekonomi politik internasional berkaitan dengan konsep proteksi, bisnis internasional berkaitan dengan konsep perdagangan bebas dan organisasi internasional yaitu rezim yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu WTO.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Dapat menjadi bahan referensi, masukan, dan tambahan pengetahuan bagi peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian dengan tema yang relevan.

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Sebagai sebuah kajian, Hubungan internasional lahir sebagai subjek akademik sekitar akhir perang dunia pertama dengan didirikannya dewan hubungan internasional *(Chair Of Internasional Relations)* di *University of Wales, Aberystwyth*, pada 1919 (Burchill dan Linklater, 2015:5). Dalam sejarah intelektul Hubungan internasional tidak bisa dipisahkan pada peristiwa Perang Dunia Pertama dimana pada masa ini, ada ambisi dari para intelektual untuk menyelesaikan konflik yang terjadi yaitu perang dunia pertama.

Sebagaimana yang diungkap oleh Burchill dan Linklater, Perang dunia pertama menjadi sebuah perhatian terutama bagi para intelektual atau sejarawan untuk mengetahui dan bagaimana serta kenapa perang itu bisa terjadi, menurutnya aktivitas keilmuan mereka dipandu oleh tujuan moral murni yaitu menemukan penyebab perang sehingga dunia dapat menghindari bencana serupa di masa yang akan datang (Burchill dan Linklater, 2015:5).

2.1.2 Liberalisme Institusional

Kaum liberal institusional melihat bahwa institusi internasional menolong memajukan kerjasama diantara negara-negara. Menurut kaum liberal, institusi internasional adalah suatu organisasi internasional, yang menyediakan seperangkat aturan untuk mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu. Seperangkat aturan tersebut disebut rezim, seperti rezim perdagangan. (Jackson&Sorensen, 2007:154).

Kaum liberalis institusional beragumen bahwa institusionalisasi yang tinggi mengurangi efek yang mengacaukan. Dalam pandangan ini menurut Mearshimer institusi dibuat karena tidak adanya kepercayaan di antara negara-negara. Kaum institusionalis menekankan bahwa institusi-institusi menyediakan kesinambungan dan perasaan stabilitas. Menurut liberalisme institusional institusi internasional dapat memajukan kerjasama antar negara dan oleh karena itu membantu mengurangi kepercayaan antara negara-negara dan rasa takut satu sama lain (Jackson&Sorensen, 2007:158).

2.1.2.1 Rezim Internasional

Menurut Robert O Keohane, rezim dapat dipahami sebagai sebuah alat untuk memfasilitasi pembuatan kesepakan substantif di antara negara-negara. Rezim memfasilitasi kesepakatan melalui penyediaan aturan, norma, prinsip, dan prosedur yang membantu aktor untuk menghadapi hambatan dan halangan. Dengan demikian rezim membantu aktor-aktor yang terlibat mendapat kepentingan melalui prilaku kolektif (Rahmawati, 2012:109).

Sementara Krasner mengungkap ada 4 elemen pembagunan rezim, yaitu: Pertama, Prinsip, yaitu pernyataan yang mendasari bagaimana rezim tersebut mengatur dan memandang hubungan negara. Norma, yaitu sejumlah standar prilaku, hak dan kewajiban setiap negara. Norma dan prinsip rezim akan menjadi karakter dari rezim bersangkutan dan tidak dapat dirubah tanpa merubah sifat dasar rezim. Berikutnya berkaitan dengan aturan, beroprasi di bawah norma dan prinsip terutam untuk mengatur persoalan yang mungkin muncul diantara prinsip yang dianut dan norma yang ingin ditegakan.Terakhir adalah berkaitan dengan prosedur pengambil kebijakan, yaitu merupakan mekanisme yang penting dalam

menentukan kebijakan karena dalam mekanisme ini akan ditentukan aturan yang berkaitan dengan prilaku dan kebijakan rezim, maksud dari hal ini adalah aturan baru yang di keluarkan untuk menyikapi isu baru (Rahmawati, 2012:110).

Salah satu pendekatan dalam memahami rezim adalah pendekatan intitusionalis atau neo -liberal yang sangat menekankan pentingnya peran rezim dalam membantu negara untuk mengenali kepentingan yang sama atas isu tertentu. Dalam pandangan neo-liberal, menitik beratkan analisisnya pada analisis ekonomi yaitu pada biaya transaksi dan biaya informasi. Robert Keohane mengungkap bahwa :

> Rezim internasional di tetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan -tujuan dari mereka dalam menghadapi tentang dilema dan kordinasi dan kolaborasi dibawah interdependensi, pemerintah pemerintah menuntut intitusi-intitusi internasional yang memungkinkan mencapai kepentingan mereka melalui tindakan kolektif terbatas (Suparman et.al, 2010:55).

Dalam bukunya, Regionalisme dalam studi hubungan internasional Nuraini S et.al mengungkap, ada beberap argumen pokok berkaitan dengan pendekatan institusio-nalisme. Pertama, dengan semakin tinggi interdependensi semakin tinggi pula tuntutan untuk melakukan kerjasama, dalam hal ini negara akan mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan secara bersama. Maka dibentuklah norma, aturan dan institusi-institusi.Berikutnya, adalah berkaitan dengan keberadaan insitusi-institusi yang begitu penting karena akan mampu memberikan keuntungan dan pengaruh terhadap aktor lain. Keuntungan tersebut bisa berupa ketentuan informasi, transparasi dan monitoring, pengurangan biaya transaksi, pengembangan ekspektasi yang sama dan memfa-silitasi penggunaan produktif dari berbagai strategi yang terkait dengan isu-isu yang dihadapi bersama (Suparman et.al, 2010:55).

2.1.3 Ekonomi Politik Internasional

Dalam studi hubungan Internasional ekonomi politik internasional tidak bisa lagi di kesampingkan sebagaimana yang diungkap oleh Keohane dan Nye Hubungan Internasional tidak bisa lagi dipahami sebagai kompetisi geo-strategi diantara negara untuk mencari kekuasaan. Isu–isu ekonomi, saluran baru komunikasi, sarana kerjasama telah melahirkan politik dunia baru dimana ekonomi politik internasional dan institusi internasional memainkan peran penting (Baylis, 2001:283).

Dalam bukunya Rantai Kapitalisme Global Bonnie Setiawan mendefinisikan ekonomi politik sebagai berikut:

> Ekonomi politik internasional adalah kajian yang berusaha mengenali hubungan yang komplek antara berbagai disiplin sub bidang di dalam ilmu politik maupun ekonomi, dan menjadi sub bidang dalam teori Hubungan Internasional.

2.1.4 Liberalisme Ekonomi

Menurut pandangan liberal ekonomi politik cenderung bersifat ekonomistis. Menurut pandangan ini EPI adalah bagian dari penerapan atau aplikasi teori dan metodologi ilmu ekonomi ke dalam setingan internasional (Bakry, 2015:29).

Liberalisme klasik erat kaitannya Adam Smith dan David Ricardo. Yang menekankan pada individu dan menginginkan hilangnya peran negara. Hal-hal yang di tekankan oleh pemikiran liberal adalah kebebasan, hak individu dan pasar bebas.

2.1.4.1 Perdagangan Bebas

Menurut Adam Smith, pasar dan mekanisme harga merupakan sebuah sarana yang paling tepat untuk kegiatan ekonomi domestik maupun internasional. Smith menekankan bahwa semua keputusan ekonomi harus dibuat oleh pasar. negara

harus semaksimal mungkin keluar dari perdagangan internasional maupun dari ekonomi domestik (Jackson&Sorensen, 2007:30).

Menurut Smith seorang tokoh liberal klasik menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari individu–individu dengan memiliki kecenderungan bawaan tukar menukar barang barter dan berdagang demi mengejar kepentingan pribadi (Burchill dan Linklater, 2015:60). Smith sebagai bapak liberalisme ekonomi menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur dalam urusan ekonomi, menurut Smith prekonomian pasar harus dibiarkan berjalan sendiri. Selain itu menurutnya ekonomi pasar adalah sumber utama kemajuan, kerjasama dan kesejahteraan (Jackson dan Sorensen, 2007:253).

2.1.5 Merkantilisme

Merkantilisme adalah dokrin atau pemikiran yang lahir pada era pembentukan negara berdaulat dan modern sepanjang abad ke 16 dan 17. merkantilisme adalah suatu pandangan dunia tentang elit-elit politik yang berada pada garis depan pembangunan negara modern (Jackson & Sorensen, 2009:231).

2.1.5.1 Proteksionisme

Tokoh pendukung Proteksionisme yaitu Friedrich List dan Alexander Hamilton. List berpijak pada paham liberal, dimana dia mengakui bahwa kebijakan ekonomi liberal dapat bekerja di sebuah negara. List mencontohkan negara Inggris. Dimana menurutnya kebijakan ekonomi liberal dapat di jalankan oleh Inggris. Tetapi menurutnya jika negara-negara ingin seperti Inggris terutama negara membagun harus menjalankan kebijakan yang berbeda (Bakry, 2015:116).

List berargumen kesejahteraan individu merupakan tanggung jawab individu sendiri. Dalam konteks negara, pencapaian kemakmuran suatu negara tidak bergantung pada kemakmuran negara lain, melainkan pada usahanya sendiri. Inggris sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat sah saja bagi Inggris untuk meletakan kepentingan nasionalnnya sebagai landasan kebijakan ekonominya. Maka dapat dipahami menurut List jika melalui bahasa, peraturan dan kekuasaan yang di milikinya Inggris berusaha membakukan sistem pasar bebas agar dapat membuka pasar negara-negara lain untuk menerima produk manufaktur yang dihasilkannya (Hadiwinata, 2006:59).

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dalam hubungan internasional penelitian kualitatif identik dengan pendekatan Tradisionalis. Dalam penelitian ini biasanya peneliti menggunakan model berpikir induktif, menurut pendekatan ini seorang peneliti menempuh kegiatan pengumpulan fakta-fakta dan berahir pada proses perumusan teori. Dalam model berfikir induktif seorang peneliti tidak perlu menetapkan terlebih dahulu teori. Tujuan dari metode induktif adalah untuk pembentukan teori. Dalam penelitian model induktif sebelum terjun kelapangan penelitian tidak perlu membatasi dengan desain penelitian beserta kerangka teori dan parameter yang bersifat ketat. Dalam Penelitian ini peneliti bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakteristik, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, atau fenomena tertentu yaitu berupa keberlangsungan rezim perdagangan bebas WTO.

4. Pembahasan

4.1 Perkembangan Rezim Perdagang Bebas WTO sebelum Cancun

Perkembangan rezim perdagangan bebas sebelum Cancun dapat kita runut pada pertemuan perdana *ministerial confrence* WTO di Singapura. Dalam pertemuan ini mendiskusikan berkaitan dengan isu baru yaitu Investasi, Perdagangan, kebijakan kompetisi, transparansi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, perlindungan terhadap investasi, serta fasilitasi perdagangan. pada pertemuan ini juga terlihat komitmen negara anggota dalam memajukan reformasi di bidang pertanian, termasuk menyetujui pelaksanaan akses konsesi pasar domestik dan subsidi ekspor. Dalam perundingan ini anggota WTO memprioritaskan untuk secara penuh konsisten mengimplementasikan berkaitan dengan liberalisasi perdagangan, perundingan ini secara umum diakui telah memuaskan dan Sehingga dalam perundingan ini dianggap sukses.

pertemuan kedua WTO tingkat menteri dilaksanakan di Jenewa, dalam perundingan ini selain dilakukannya pertemuan rutin tingkat menteri 2 tahun sekali, pertemuan ini juga sekaligus momentum peringatan berdirinya WTO, dalam perundingan ini juga para menteri menyambut keberhasilan negosiasi telekomunikasi dan jasa keuangan serta mencatat pelaksanaan Perjanjian Teknologi Informasi. Dalam hal ini para menteri berkomitmen untuk mencapai liberalisasi progresif perdagangan barang dan jasa dan menolak praktek proteksionisme selain itu juga para menteri berkomitmen mengimplementasikan secara penuh dari keputusan yang dibuat dalam Persetujuan WTO.

Namun dalam pertemuan tingkat menteri WTO ke-3 di Seattel Amerika Serikat tidak terjadi sebuah kesepakatan. Diamana dalam pertemuan ini terjadi demo besar-besaran dan unjuk rasa. Dalam perundingan ini di harapkan terjadi awal putaran baru negosiasi perdagangan multilateral arahan negosiasi-negosiasi tersebut untuk dimulai pada tahun 2000 dalam kerangka putaran Uruguay terutama dalam bidang pertanian. Selain itu perkembangan rezim perdagangan bebas WTO dapat dilihat pada perundingan dibawah GATT. Dalam perundingan ini isu yang dibahas lebih pada isu tarif, putaran perundingan di bawah GATT pertaman dilaksanakan di Jenewa pada putaran ini peserta menyetujui konsesi penurunan tarif sebanyak 45.000 produk dengan nilai sebesar 10 miliar Dollar AS. Putaran perundingan terahir dibawah GATT dinamakan putaran Uruguay, dalam putaran ini isu yang dibahas tidak hanya isu tarif tetapi juga mencangkup bidang- bidang baru yang selama ini belum pernah ditangani oleh GATT diantaranya jasa, hak kekayaan intelektual, selain itu yang paling penting dalam perundingan ini diputuskan pergantian sekertaris GATT *(General Agreemet on Tariffs and Trade)* dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa putaran terahir ini dilaksanakan di Marakech Maroko.

4.2 Perkembangan Perundingan WTO Pasca Pertemuan Cancun

Perkembangan perundingan WTO Pasca Cancun adalah putaran WTO dibawah putaran perundingan *Doha Development Agenda*, Agenda ini di luncurkan pada pertemuan tingkat menteri WTO di Doha Qatar. Setelah perundingan di Doha Qatar, putaran perundingan pertama dalam putaran DDA di laksanakan di Cancun Mexico. Dalam perundingan ini isu pertanian menjadi salah satu isu yang dibahas dan dinegosiasikan oleh para anggota negara WTO. pertemuan Cancun menjadi pertemuan penting dimana dalam perundingan ini negara–negara berkelompok dalam bernegosiasi terutama dalam bidang pertanian. Kelompok tersebut diantaranya kelompok Amerika Serikat dan Uni Eropa, kelompok G-20 kelompok G-33 dan kelompok lainnya.

Perundingan tingkat menteri WTO pasca pertemuan Cancun, adalah perundingan yang dilakukan di markas WTO yaitu Jenewa, perundingan ini di lakukan pasca kegagalan pada pertemuan Cancun, sehingga para menteri melakukan pertemuan mini di Jenewa terutama dalam meyikapi kebuntuan negosiasi di Cancun, pada pertemuan ini dihasilkan sebuah paket yang sering dinamakan "Paket Juli". Dalam pertemuan ini dihasilkan sebuah kesepatan di antaranya berkaitan dengan subsidi domestik, yaitu *Special and differential Treatment* (S&D) merupakan bagian integral dari komponen *domestic support*, oleh karena itu modalitas yang akan dibentuk harus memuat penurunan subsidi yang serendah-rendahnya dan pelaksanaannya dalam waktu yang lama. Selain itu Negara maju harus menurunkan bantuan domestik yang dapat mendistorsi pasar secara bertahap, sehingga bantuan tersebut tinggal mencapai 5 % dari seluruh total bantuan yang diterima. Sedangkan tahun pertama penurunan sebesar 20%. Negara berkembang tetap dapat mempertahankan bantuan sebesar 10 % untuk meningka tkan tarap hidup petani kecil dan miskin.

Setelah itu perundingan kembali dilakukan di Paris Prancis. Perundingan mini menteri ini dihadiri oleh 30 negara diantarnya negara yang berkelompok pada pertemuan Cancun yaitu G-33, G-20 dan juga dihadiri oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dalam pertemuan Kamal Nath menteri perdagangan India menegaskan bahwa negara maju yang memberlakukan tarif tinggi terhadap bea masuk bagi negara berkembang mengakibaatkan kerugian bagi petani di negara berkembang. Pada perundingan ini tidak menghasilkan sebuah titik temua, sehingga pada tahun 2005 diadakan pertemuan tingkat menteri di Hongkong, meskipun pada pertemuan ini terjadi demo besar-besaran namun dalam konferensi ini telah berhasil disepakati Program Kerja Doha yang dituangkan dalam *Ministerial Declaration*, yang berisi arahan dan *time-line* bagi tiap isu yang dirundingkan. Keputusan dalam deklarasi mengenai tiga pilar perundingan sektor pertanian yaitu subsidi domestik, subsidi ekspor dan aksea pasar. Selain itu pada pertemuan ini disusun kerangka modalitas berkaitan dengan paket lengkap dari kesepakatan di bidang pertanian. Dalam perundingan ini diharapkan modalitas berkaitan pertanian bisa diselesaikan pada akhir 2006. Dalam hal ini modalitas akan menjelaskan bagaimana kesepakatan akhir akan berbentuk, mengejar target numerik dan lainnya untuk reformasi lebih lanjut dari perdagangan pertanian. Meskipun dalam pertemuan ini hanya menyusus kerangka modalitas namun pertemuan ini berhasil menghantarkan pada pertemuan selanjutnya.

Perundingan WTO berikutnya dilangsungkan di postdam Jerman, pertemuan mini menteri ini dihadiri oleh negara G-20 yang diwakili oleh Brazil dan India serta Uni Eropa dan Amerika Serikat, dalam pertemuan ini Uni Eropa dan Amerika Serikat meminta negara berkembang untuk membuka akses pasar non-pertanian (NAMA).

Sementara negara-negara berkembang menuntut Amerika Serikat berkaitan dengan pemotongan subsidi pertanian dan membuka akses pasar pertanian. Pada posisi ini isu pertanian menjadi salah satu isu utama yang menjadi permasalahan terutama perbedaan pandangan antara negara maju dan negara berkembang. Pada tahun 2008 pertemuan mini menteri kembali dilakukan di Jenewa. Dalam pertemuan ini kembali terjadi kebutuan negosiasi. Isu pertanian terutama berkaitan dengan masalah akses pasar dan subsidi domestik. Kebutuan terjadi antara Amerika Serikat, India dan Cina. Direktur Jenderal WTO Pascal Lamy mengungkap pertemuan ini telah buntu dalam hal ini para anggota tidak mampuh menjembantani perbedaan diantara mereka. Pada tahun 2009 perundingan tingkat menteri WTO dilaksanakan di Jenewa. Sebelum pertemuan resmi ke-7 para menteri kelompok G-20 dan G-33 melakukan pertemuan,

negara G-20 di pimpin oleh Brazil dengan topik utama yang dibicarakan adalah *State of Play* dari Perundingan putaran Doha. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan sebuah komunike yang menekankan bahwa krisis ekonomi telah memberikan dampak yang serius terhadap perdagangan international yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya praktek "proteksionisme" yang dilakukan oleh negara-negara maju dengan bentuk pemberian subsidi kepada petaninya. Dalam perundingan ini tidak menghasilkan sebuah kesepakatan sebagaimana dalam pernyataan *closing statment* dari Sekjen WTO.

Perundingan WTO berikutnya kembali dilaksanakan di Jenewa, di sela-sela pertemuan resmi WTO ini, para menteri G-20 melakukan pertemuan. Dalam pertemuan ini Indonesia adalah salah satu anggota yang ikut berpartisipasi. Indonesia diwakili oleh menteri perdagangan RI Gita Wirjawan, menteri perdagangan mengungkap bahwa besarnya pemberian subsidi domestik kepada sektor pertanian di negara maju perlu terus dikurangi agar tidak menutup peluang peningkatan ekspor produk pertanian dari negara berkembang. Subsidi atas komoditi ekspor negara maju harus dihapuskan, karena menciptakan persaingan tidak sehat yang membanjiri pasar domestik negara berkembang.

Dua perundingan berikutnya dilangsungkan di Bali dan Kenya dalam dua perundingan ini dihasilkan sebuah konsensus dimana selama perundingan dilaksanakan tidak pernah menghaasilkan sebuah konsensus terutama di bahwa perundingan *Doha Development Agenda*, namun dalam dua perundingan terahir menghasilkan sebuah paket yaitu "paket Bali" dan "paket Nairobi" dalam paket Bali isu pertanian yang selama ini menjadi isu yang sangat sulit mencapai kesepakatan akhirnya dapat dicapai diantaranya berkaitan dengan subsidi domesti, memberi keleluasaan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memberikan subsidi bagi ketersediaan pangan yang murah bagi rakyat miskin tanpa khawatir digugat di Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) WTO. Dimana dalam hal ini negara berkembang mendapat sebuah fleksibilitas terutama jika kita merujuk pada apa yang di mandatkan dalam putaran Doha.

Keberhasilan lain dalam paket ini adalah berkaitan dengan fasilitas perdagangan, dalam hal ini negara anggota berkomitmen untuk melakukan penyederhanaan dan peningkatan transparansi berbagai ketentuan yang mengatur ekspor, impor, dan barang dalam proses transit sehingga kegiatan perdagangan dunia dapat menjadi semakin cepat, mudah, dan murah. Sementara dalam paket Nairobi, diputuskan berkaitan dengan pilar subsidi ekspor negara anggota bersepakat untuk menghapus segala bentuk subsidi ekspor, dalam posisi ini pengapusan subsidi bagi negara maju dimulai pada tahun 2016 sementara negara berkembang 2018 dan LDCs 2023.

4.2. Kebijakan Proteksi Pertanian Amerika Serikat Pasca Pertemuan Cancun

Pertemuan Cancun menjadi perundingan yang sangat penting dimana dalam perundingan ini negara-negara menjadi berkelompok dalam melakukan negosiasi. Kelompok yang amat penting dalam pertemuan ini adalah kelompok G-20 dan G-33 serta Kelompok Amerika dan Uni Eropa. Dalam pertemuan Cancun Amerika dan Uni Eropa mengajukan *join paper* dalam proposal tersebut menghendaki adanya penurunan tarif yang cukup signifikan di Negara berkembang, tetapi tidak menginginkan adanya pengurangan subsidi dan tidak secara tegas memuat komitmen untuk menurunkan tarif tinggi di Negara maju. Hal ini lah yang di tentang oleh negara G-20. Selain itu negara G-20 meminta untuk penurunan subsidi domestik *(domestik support)* dan penghapusan subsidi ekspor pertanian di negara-negara maju, sebagaimana dimandatkan dalam Deklarasi Doha.

Salah satu negara yang aktif dan mempunyai program berkaitan dengan pertanian adalah Amerika Serikat. Program tersebut tertuang dalam undang-undang yang diperbaharui setiap lima tahun sekali. Dalam pertemuan di Cancun negara G-20 meminta Amerika Serikat mencabut bantuan domestik dan penghapusan subsidi ekspor. Perkembangan kebijakan Amerika Serikat pasca pertemuan Cancun dapat dilihat pada program subsidi langung komoditas pertanian komidatas yang memenuhi syarat dalam progaram ini yaitu gandum, jagung, barley, gandum, kapas, beras, kedelai, minyak sayur lainnya dan kacang tanah. Dapat dilihat pada tabel 4.4 berkaitan dengan pembayaran langsung komoditas pertanian di bawah Farm act 2002 dan Farm act 2008.

Table 4.4

Pembayaran Langsung Komoditas Pertanian

(USD/t)	Direct payment rates	
	2002 Farm Act	2008 Farm Act
	2002-2007	2008-2012
Wheat	19.1	19.1
Maize	11.0	11.0
Grain sorghum	13.8	13.8
Barley	11.0	11.0
Oats	1.7	1.7
Upland cotton	147.0	147.0
Rice	51.8	n.a.
Long grain rice	*n.a.*	*51.8*
Medium grain rice	*n.a.*	*51.8*
Soybeans	16.2	16.2
Other oilseeds	17.6	17.6
Sugar cane	n.a.	n.a.
Sugar beet	n.a.	n.a.
Peanuts	39.7	36.0
Dried peas	n.a.	n.a.
Lentils	n.a.	n.a.
Small chickpeas	n.a.	n.a.
Large chickpeas	n.a.	n.a.

n.a.: not applicable.
Note: Crop year periods vary between different commodities.

Sumber : OECD 2011:49

Dari data diatas subsidi langsung yang diberikan oleh Amerika Serikat tidak berubah. Selain itu beberapa program lain diantaranya konservasi dibawah Farm act 2002 dan 2008 mengalami peningkatan pengerluaran anggaran sekitar 11% (USD 2,7 miliar). Selain itu jika kita melihat pada pembayaran langsung per comoditas dalam farm act 2002 dan farm act 2008 total pembayaran langsung per penerima cenderung meningkat hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini.

Table 4.5

Commodity Subsidy Payments, by Commodity

2002

Commodity	Total Payments	Number of Recipients	Payment Per Recipient
Total Commodity Subsidies	**$8,831,971,671**	**1,319,110**	**$6,695**
Corn	$1,981,564,489	858,077	$2,309
Cotton	$1,669,746,908	127,582	$13,088
Peanuts	$1,092,846,187	63,139	$17,309
Rice	$1,073,167,886	34,888	$30,760
Wheat	$975,272,805	750,825	$1,299
Dairy	$848,347,339	71,976	$11,787
Soybeans	$670,801,852	250,622	$2,677
Sorghum	$188,981,974	312,031	$606
Barley	$82,801,044	182,657	$453
Apples	$74,334,966	6,469	$11,491
Sugar	$44,288,049	5,109	$8,669
Sheep meat	$32,401,797	17,210	$1,883
Sunflower seed	$6,518,597	5,910	$1,103
Oats	$6,226,386	345,197	$18
Tobacco	$4,990,960	17,623	$283
Safflower seed	$1,885,304	1,037	$1,818

Source: Environmental Working Group, *Farm Subsidy Database*, United States Summary, 2002 [http://www.ewg.org/farm/region.php?fips=00000&progcode=total&yr=2002]

Sumber : CRS Report 2004:5

Peningkatan anggaran tersebut terutama dalam pembayaran langsung per penerima dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6

Commodity Subsidy Payments, by Commodity

2008

Corn	85.9	32.8	$24.39
Wheat	74.2	28.3	$15.21
Soybeans	51.3	19.6	$11.54
Upland cotton	18.2	7.0	$33.86
Sorghum	11.7	4.5	$16.87
Barley	8.5	3.3	$9.68
Rice	4.4	1.7	$96.25
Oats	3.0	1.2	$0.99
Peanuts	1.5	0.6	$45.85
Other[1]	1.0	0.4	—
Total	259.8	100	$19.57

[1]Other direct payment-eligible commodities include canola, crambe, flaxseed, mustard, rapeseed, safflower, sesame, and sunflower.

Sumber : USDA 2012:5

4.3 Keberlangsungan Rezim Perdagangan Bebas WTO dengan Dilakukannya Putaran Perundingan Pasca Cancun

Keberlangsungan rezim perdagangan bebas WTO dengan dilakukannya perundingan-perundingan pasca Cancun, terutama isu pertanian dibawah putaran Doha atau *Doha Development Agenda* adalah tidak berubah dan *status quo*. Dengan dilakukannya perundingan selama ini isu pertanian menjadi isu yang sangat sulit untuk mencapai sebuah kesepakatan, hal ini diakibatkan perbedaan kepentingan. Dimana negara berkembang beranggapan isu pertanian sangat terkait dengan permasalahan sosial ekonomi (antara lain *food security, livelihood securit*y dan *rural development*). Sementara bagi negara maju, pemberian subsidi domestik mempunyai dimensi politis dalam kebijakan pertaniannya, hal ini dapat dilihat pada kebijakan pertanian Amerika Serikat. Perundingan isu pertanian dalam hal ini dapat dilihat dalam proses negosiasi yang dilakukan, negara berkembang dan negara maju masih belum dapat bersepakat dalam perundingan ini. Meskipu ada berbagai kemajuan dalam perundingan ini salah satunya perundingan di Bali maupun Nairobi, namun kedua perundingan tersebut tidak secara penuh menghasilkan kesepakatan yang nyata.

Dalam perundingan Bali negara maju tetap meminta membuka akses pasar non produk pertanian di buka dengan konsesi negara berkembang di persilahkan untuk memberikan subsdi domestik melebihi angka miniman yang tertuang dalam perjanjian pertanian. Disisi lain pada perundingan Nairobi Kenya meskipun menghasilkan kesepakatan dalam pertanian yaitu berupa penghapusan subsidi ekspor, namun diawal pertemuan di nairobi Amerika Serikat mendorong isu baru untuk dinegosiasikan yaitu investasi, e-commerce, kompetisi dan pengadaan pemerintah dimana isu ini sangat lebih relevan dengan agenda WTO saat ini. Meskipun diakhir pertemuan menghasilkan keputusan yaitu berupa penghapusan subsidi ekspor.

Sehingga jika kita melihat pada proses perundingan terahir yaitu baik Nairobi maupun di Bali arah keberlangsungan liberalisasi dapat dikatakan mengalami kemajuan, dimana dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya negosiasi-negosiasi mengalami kemandegan dan kebuntuan antara negara maju dan berkembang.

5.1 Kesimpulan

Keberlangsungan rezim perdagangan bebas WTO dengan adanya kebijakan proteksi pertanian Amerika Serikat dalam perjalannya selama ini, terutama isu pertanian adalah *Status Quo*. Dimana dalam keadaan ini pihak-pihak yang berunding mendapati kedudukan yang tidak menguntungkan untuk mengambil sebuah keputusan oleh sebab dampak yang akan ditimbulkan, sehingga menjadikan *Status Quo* sebagai penyelesaian alternatif. Hal ini diantaranya diakibatkan dengan adanya kebijkan proteksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam bidang pertanian. Dalam hal ini Amerika Serikat berpandangan bahwa kepentingan nasional negaranya masih menjadi prioritas utama meskipun negara ini berpaham pada ideologi liberal. Pada posisi ini Amerika Serikat sebagaimana yang diungkap oleh Alexander Hamilton, yaitu negara harus berperan aktif dalam mengembangkan sistem produksi terutama dalam sistem perdagangan internasional yang dapat merugikan kepentingan nasional.

Pada posisi ini tujuan dari perdagangan bebas WTO tidak dapat tercapai terutama dalam kerangka perundingan *Doha Development Agenda* yaitu agenda ini tidak hanya berorietasi pada pertumbuhan ekonomi saja, namun juga kepada dimensi pembangunan agar negara-negara berkembang dan LDCs dapat terintegrasi secara penuh kedalam sistem WTO dengan beberapa fleksibilitas yang dimandatkan dalam pertemuan di Doha, Qatar.

Selain itu dalam hal ini rezim perdagangan bebas WTO ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan-tujuan dari mereka dalam menghadapi tentang dilema dan kordinasi dan kolaborasi dibawah interdependensi, pemerintah-pemerintah menuntut intitusi-intitusi internasional yang memungkinkan mencapai kepentingan mereka melalui tindakan kolektif terbatas. Sehingga rezim perdagangan WTO terutama dalam isu pertanian, negara–negara tetap melakukan negosiasi-negosiasi agar terjadi kesepakatan hal ini tiadalain adalah meningkatnya saling ketergantungan antar negara meskipun dalam posisi ini negara-negara bekerjasama, namun dibalik kerjasama tersebut negara-negara memaksimalkan kerjasama demi keutungan absolut melalui aturan-aturan yang dibuat. Hal ini dapat dilihat pada negosiasi pertanian, dimana negara-negara berkelompok untuk mendapatkan keuntungan absolut melalui aturan dalam negosiasi pertanian WTO. Pada perundingan Bali negara berkembang berhasil dalam memperjuangkan kepentingannya. Hal ini dapat terwakili oleh India dan dalam perundingan tersebut berhasil memberikan keringanan kepada negara berkembang untuk memberikan subsidi pada petani.

Selain itu dalam perundingan WTO dibawah DDA, ada prinsip yang disepakati yaitu *Single Undertaking* dalam prinsip ini, bahwa semua masalah atau isu dalam perundingan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan oleh karena itu "tidak akan ada kesepakatan sampai semua masalah atau isu di sepakati" Hal ini dapat dilihat belum disepakatinya 2 pilar dalam isu pertanian yaitu subsidi domestik dan akese pasar. Pada perundingan terahir di Nairobi Kenya, Amerika Serikat mendorong isu lain untuk dibahas yaitu seperti Investasi, e-commerce, kompetisi dan pengadaan pemerintah dan menolak untuk membahas masalah susbsidi domestik.

Sehingga dapat disimpulkan perundingan WTO dalam bidang pertaniana adalah *Status Quo*. Namun jika kita melihat pada dua pertemuan terakhir di Bali dan Nairobi. Arah menuju liberalisasi di bidang pertanian dapat berjalan dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam dua perundingan terahir. Dalam hal ini dapat dilihat pada keputusan akhir di Nairobi yaitu penghapusan subsidi ekspor. Dengan keputusan tersebut dapat menjadi titik awal bagi proses liberalisasi dalam bidang pertanian.

Daftar Pustaka

Acuan dari Buku

Asrudin, Suryana Jaka 2009. *Refleksi Teori Hubungan Internasional dari Tradisonal ke Kontem porer*.Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ball,Geringer dan Minor. 2014. *Bisnis Internasional (Internasional Business*). Jakarta: Salemba.

Baylis J dan Steve Smith. 2001. *The Globalizations of World Politics: an Introductios to International Relations*. New York: Oxford University press.

Burchill Scott dan Linklater Andrew. 2015. *Teori–Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusamedia.

Hadiwinata Sugeng.B. 2006. *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta: Kanisius.

Hennida Citra. 2015. *Rezim dan Organisasi Internasional, Interaksi Negara, Kedaulatan dan Institusi Multilateral*. Malang: Intrans Publising.

Iva Rahmawati. 2012. *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Aswajaya Presindo.

Jackson Robert dan George Sorensen. 2007. *Pengantar Hubungan Internasional* (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

OECD.2011. *Evaluations of Agicultural Policy Reforms in the United States*. Paris:OECD publishing.

Suparman N, Silvya D dan Sudirman A. 2010. *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suryadi Umar.B. 2015. *Ekonomi Politik Internasiona suatu Pengatar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno Budi. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.

Acuan artikel dalam Jurnal

Dania Rahma. 2008. Analisis Kebijakan Publik Amerika Serikat dalam Implementasi Publik Law 107-171 *Farm Security and Rural Investment Act of* 2002 Pasca Agreement on Agriculture. Spirit Publik 2:185-198.

Acuan artikel dalam *Website*

Jasper Womach. 2004. *Average Farm Subsidy Payments, by State, 2002*. CRS Report for Congress.

Jennifer Ifft et,al .2012. *Potential Farm-Level Effects of Eliminating Direct Payments.* USDA.

http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasa mamult ilateral/Pages/World-Trade-Organization-%28 WT O %29.aspx pada tanggal [17/05/ 2016].

http://www.kemendag.go.id/id/faq pada tanggal [17/05/2016].

http:// www.keme ndag.go.id/id/faq pada tanggal [24 /04/ 2016].

http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.p hp?module=news_detail&news_content_id=422&det ail=true pada tanggal [18/05/2016].

http://www .kemen dag.go.id/id/faq pada tanggal [17/05/2016].

http://www. globalissues.org/article/438/wto-meeting-in-cancun-mexico-2003 diakses pada tanggal [03/-8/2016].

http://www.antaranews .com/print/111479/perjalanan-panjang-terbentuknya-sistem-perdagangan-internasi onal[18/05/2016].

http://economy. okezone. com/read/2013/12 /10/ 320/910062/mendag-banggakan-3-paket-hasil-wto-di-bali pada tanggal [18/05/20 16].

http://www.fas.usda.gov/itp/wto/proposal.htm pada tanggal [18/05/2016].

http://www.ers.usda. gov/publications/ap-administrat ive-publicati on/ap-022.aspx diakses pada tanggal [07/06/2016].